

Dampak Penghasilan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Ririn Yuni Ariska

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: harimunira3376@gmail.com

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini berjumlah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan Belanja Modal tidak Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, namun secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2019). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah, serta pembiayaan anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif (Kawedar, 2013).

Dalam kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu (Saragih, 2020). Oleh sebab itu alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap pemerintah daerah yang salah satunya adalah infrastruktur di daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71, 2010). Pada dasarnya belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Padahal pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk halhal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Khairunnisa, 2018).

Menurut (Pilat, J. J., & Morasa, 2017) "Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial." Sedangkan menurut (Ardila, 2015) "Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik".

Di Sumatera Utara sendiri, fenomena mengenai kinerja keuangan masih mencerminkan bahwa persentase rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang

mampunya pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2018 kinerja keuangan rasio kemandirian meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2019 hingga 2020 kinerja keuangan di Sumatera Utara memiliki rasio kemandirian yang kurang stabil dikarenakan pada tahun 2019 hingga 2020 di Indonesia khususnya di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan ekonomi yang disebabkan oleh adanya virus Covid-19.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan diri pada pemerintah pusat.

Adapun Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 s/d 2020 adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan dari tahun ketahun tidak stabil cenderung menurun. Hal ini berarti Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih kurang mampu untuk mengelolala Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat.

Hal ini dapat diperjelas dengan beberapa uraian data pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pada Kabupaten Deli Serdang, dimana pada tahun 2017 kinerja keuangannya sebesar 42,73%, namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kinerja keuangannya mengalami penurunan sebesar 36,32%, 0,58% dan 0,44%.

Pada Kabupaten Tapanuli Tengah, kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 8,73% namun mengalami penurunan pada kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020, yaitu sebesar 8,46% dan 0,10%. Pada Kabupaten Tapanuli Utara kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 kinerja keuangannya meningkat sebesar 13,27% dari tahun 2017 sebesar 0,19%, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,14% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,16% walaupun peningkatannya tidak sebesar tahun 2017.

Pada Kabupaten Toba Samosir kinerja keuangannya juga mengalami fuktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 6,87% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,30% namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,09%.

Pada Kabupaten Samosir kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2017 sebesar 8,01%, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 7,71% dan 0,10% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,11% walaupun tidak sebesar kinerja keuangan pada tahun 2017.

Pada Kabupaten Labuhan Batu kinerja keuangannya juga mengalami fluktuasi, dapat terlihat pada tahun 2017 sebesar 13,72%, pada tahun 2018 kinerja keuangannya mengalami peningkatan sebesar 17,92%, namun pada tahun 2019 kinerja keuangannya mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,19% dan pada tahun 2020 kinerja keuangannya kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% walaupun tidak sebesar kinerja keuangan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada Kota Medan kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 0,82% namun pada tahun 2018 kinerja keuangannya mengalami peningkatan yaitu sebesar 75,85% dan pada tahun 2019 dan 2020 kinerjanya kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,85% dan 0,73%. Kinerja keuangan pada Kota Binjai juga mengalami fluktuasi, dimana kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 19,36% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 18,72% dan 0,15% tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,17% walaupun tidak sebesar pada tahun 2017 dan 2018.

Kinerja keuangan kota Sibolga juga mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2017 0,21% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 15,85%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,14% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,17% walaupun tidak sebesar pada tahun 2017 dan 2018.

Kota Sibolga kinerja keuangannya pada tahun 2017 sebesar 0,07% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 6,17% lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 0,06% dan 0,05%.

Berdasarkan Uraian diatas, maka adanya penelitian terdahulu yang juga dilakukan peneliti lainnya seperti yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung periode 2013 – 2017. Begitu pula hasil penelitian (Lathifa, I., & Hasna, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal yang sejalan dengan penelitian (Sari & Mustanda, 2019).

Namun dalam penelitian (Mulia, 2016), menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Selain PAD, salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di daerah adalah dengan menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka, V., & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso, I., & Suparta, 2015).

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu DAK. Sedangkan DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh secara signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah penelitian Ade dkk, (2016), terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (Budianto, B.,

& Alexander, 2016), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Mulia, 2016), menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Serta penelitian (Nuwun, 2020), menunjukkan bahwa DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah maka dapat diketahui bahwa pengaruh dari PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten.

Berdasarkan review dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat celah (gap) dalam hasil tersebut. Yaitu dimana hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang konsisten. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti jelaskan, maka dapatkah PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Untuk memperoleh bukti empiris dari pertanyaan tersebut maka penelitian ini berjudul " Dampak Penghasilan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" menjadi menarik untuk dilakukan serta peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai objek dari pada judul tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian dengan metode asosiatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Utara.

3. HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel citra merek, kualitas produk, kualitas pelayanan dengan variabel keputusan pembelian apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.676	1.572		4.884	.000		
PAD	3.294	.000	1.001	8.641	.000	.578	1.731
DP	-2.200	.000	-.761	6.634	.000	.590	1.694
BM	-8.764	.000	-.124	1.035	.308	.537	1.864

a. Dependent Variable: KK

Dari tabel di atas, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut : $Y = 7,677+3,294X_1-2,200X_2-8,764X_3+e$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

a. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan belanja modal mempunyai arah koefisien yang bertanda negative terhadap kinerja keuangan

b. Koefisien pendapatan asli daerah memberikan nilai sebesar 3,294 yang berarti bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan.

c. Koefisien dana perimbangan nilai sebesar -2,200 yang berarti bahwa menurunnya dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

d. Koefisien belanja modal sebesar -8,764 yang berarti bahwa menurunnya belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis ialah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol).

Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara parsial:

Tabel.2 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.676	1.572		4.884	.000		
PAD	3.294E-13	.000	1.001	8.641	.000	.578	1.731
DP	2.200E-13	.000	-.761	6.634	.000	.590	1.694
BM	8.764E-14	.000	-.124	1.035	.308	.537	1.864

a. Dependent Variable: KK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka, H1 dapat diterima.
2. Nilai signifikansi Dana Perimbangan sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka, H2 dapat diterima.
3. Nilai signifikansi Belanja Modal sebesar $0,308 > 0,05$ menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka, H3 ditolak.

b) Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variable independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit.

Tabel.3 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6143.455	3	2047.818	30.951	.000 ^a
	Residual	2381.850	36	66.163		
	Total	8525.306	39			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$, artinya bahwa model ini layak untuk digunakan pada penelitian terhadap kinerja keuangan.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menguji kemampuan model regresi variabel penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 ^a	.721	.697	8.13403	2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

Menurut Ghozali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai R² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena R dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Berdasarkan tabel di atas, nilai R² adalah 0,721. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen adalah sebesar 72,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati et al., 2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berupa pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena nantinya pendapatan asli daerah yang merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah sehingga terciptanya daerah yang memiliki kemandirian daerah dan dapat terciptanya otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Besarnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada suatu periode dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sesuai dengan kehendak pemerintah daerah. Pada umumnya PAD digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi belanja dalam sektor-sektor produktif, misalnya belanja modal dan belanja barang dan jasa yang berkaitan secara langsung terhadap peningkatan program kerja pemerintah daerah. Dari peningkatan program kerja pemerintah tersebut maka pembangunan daerah akan meningkat dan sarana-prasarana daerah semakin memadai untuk menunjang peningkatan PAD di tahun berikutnya, sehingga dari peningkatan PAD tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati et al., 2012) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik.

Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat memengaruhi tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik. Karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0,308 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh dari belanja modal yang diasumsikan adalah pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta merta menjadi cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadi objek pemborosan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks lain yang mana belanja modal seharusnya dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan daerah justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak terciptanya benefit dan impact kepada daerah tersebut sehingga sulit untuk mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah.

Karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi Kinerja Keuangan. Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Belanja Modal yang baik dari segi seorang manajer di suatu entitas pemerintahan di daerah yaitu kepala daerah harus paham betul asas yang berlaku serta ukuran Kinerja untuk menilai keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Ada pun ukuran keberhasilan dari segi Belanja Modal menurut (Halim, 2014) adalah lima tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap harga. Sehingga banyaknya dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik dan tepat. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh

pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengalokasian Belanja Modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengalokasian yang lebih banyak pada Belanja Modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengujian statistic F diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal dan kinerja keuangan. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,721 atau 72,1 yang artinya kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara pada BPKAD Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebesar 72,1%.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan alasan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

6. REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- AISYAH, S. ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS TENAGA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU.
- Ammy, B., & Ramadhan, P. R. (2021). Determinan Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 103-110.
- Ardila, I. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1-9.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1), 24-36.
- Hani, S. (2021). [TURNITIN] GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS IN MEASURING QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND TRANSFER INVESTOR LEVELS. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Irsan, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Permintaan Daging Sapi (Studi Kasus: Pusat Pasar Kota Medan) (Doctoral dissertation).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z. (2009). Pengaruh Return On Asset (Roe), Return On Equity (Roe), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 3(2), 12-20.
- Harahap, S. H., & ALPI, M. F. (2018). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DIDALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Kalsum, U. (2021). Factors Affecting the Disclosure of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 2(2), 113-120.
- Pulungan, F. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, Kantor Cabang Stabat (Doctoral dissertation).
- Rambe, S., & Lubis, H. Z. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(1), 65-76.
- Ritonga, P., & Hafisah, H. (2018). PENGEMBANGAN DAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAHPENGANTAR AKUNTANSI BERBASIS KKN DAN PEMANFAATAN KONTEN DOKUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Santoso, I., & Suparta, I. W. (2015). Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 135-165.
- Saragih. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia.
- Saragih, F. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora E-ISSN 2775-4049 SCENARIO 2020*.
- Sari, R. W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Kimia Farma Tbk (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sibuea, B. (2020). Bukti Kehadiran Seminar Internasional di UISU Medan September 2018. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIREGAR, S. A., & LUFRIANSYAH, L. (2018). ANALISIS DETERMINAN PROFITABILITAS DI BURSA EFEK INDONESIA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Zurriah, R. (2021). Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 101-106.